



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. Jatirogo No. 20 Pancur Kode Pos 59262

Website : kecpancur.rembangkab.go.id

E-mail : kecpancur@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pancur Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Pancur Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Pancur tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 18 Februari 2026

 KAMANT PANCUR
SUTARWI S.IP.MPA.MIDS
Pembina Tk. I
NIP. 19680930 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Pancur Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” :
 - Indikator capaian sasaran strategis adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pancur memperoleh Nilai IKM sebesar 96,78. Mengidentifikasi bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada Masyarakat mendapatkan nilai sangat Baik jika dibandingkan target Renstra 2021-2026 untuk tahun 2025 yaitu 88,00 dan lebih juga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 87,53. Pelayanan di Kecamatan Pancur memiliki Kinerja Baik, namun perubahan sistem pelayanan dari kecamatan ke Desa justru malah mengurangi kepuasan Masyarakat yang dinilai tidak praktis.
2. Program – program yang mendukung capaian sasaran Strategis adalah :
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100%
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan capaian kinerja 100%
 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100%
 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 100%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Pancur kedepan, sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.

2. Perlunya meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa.
3. Perlunya meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
4. Perlunya Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah	1
1.1.1 Tugas Dan Fungsi	2
1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah	3
1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	3
1.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah	3
1.3 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah	4
1.3.1 Sumber Daya Manusia	4
1.3.2 Sarana Prasarana /BMD	7
1.3.3 Anggaran	10
1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat	12
1.5 Dasar Hukum	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	20
2.5 Perjanjian Kinerja	24
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	30
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah	31
3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi	34
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	36
3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda	37
3.5 Realisasi Anggaran	38
3.6 Analisa Efisiensi Anggaran	40
3.7 Inventarisasi Lintas Sektor	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan	47
4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah	47
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	47
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.4	Sarana Prasarana Kec. Pancur Kab. Rembang	8
Tabel 1.5	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	11
Tabel 1.6	Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kec. Pancur Kab. Rembang Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kec. Pancur Kab. Rembang Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025	24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Pancur Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	30
Tabel 3.5	Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan	31
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	31
Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	32
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	35
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pancur Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realiasasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	36
Tabel 3.10	Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec. Pancur Kab. Rembang Terhadap Sasaran Pemda	37
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	39
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	2
Gambar 1.3	Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur	7

BAB I

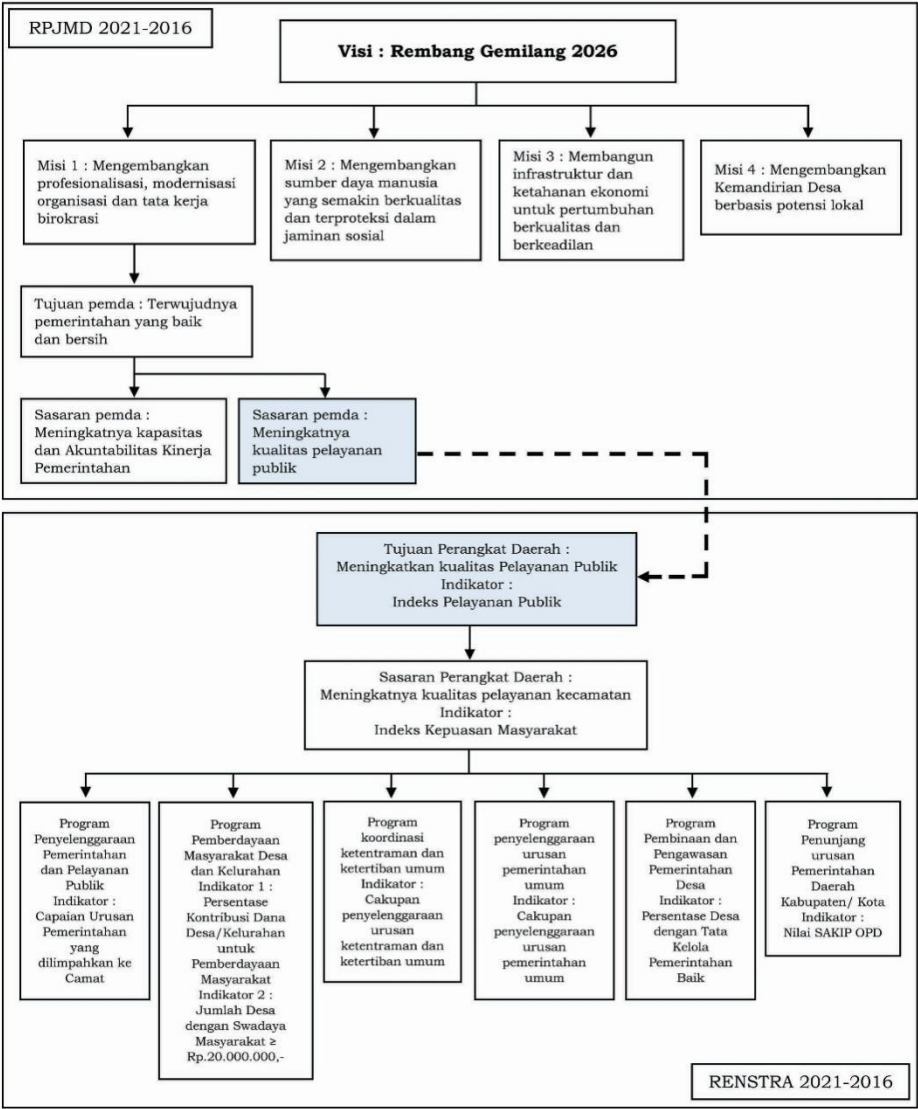
PENDAHULUAN

1.1 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

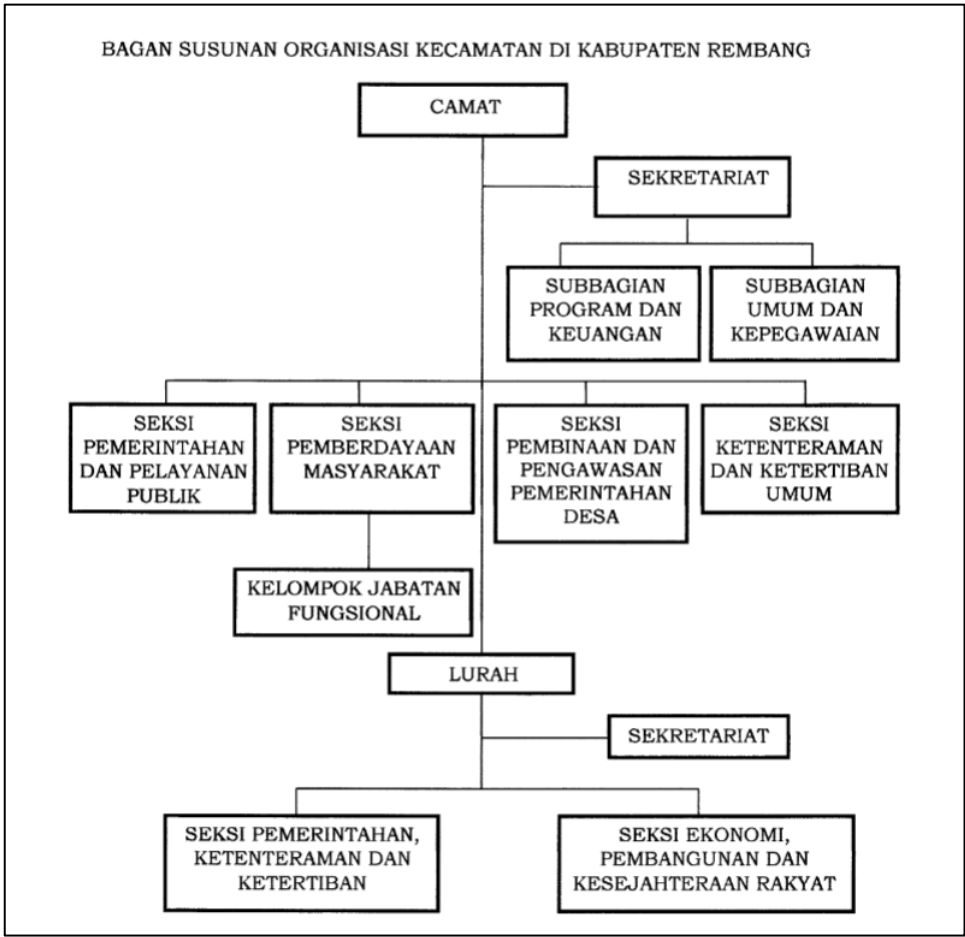
Gambar 1.1

Cascading Kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang tahun 2021-2026



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Pancur. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pancur :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021

1.1.1 Tugas Dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut kecamatan juga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah

1.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

1.2.2 Isu strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pancur dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pancur yang merupakan isu strategis sesuai dokumen Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2021-2026. Isu-isu tersebut antara lain :

- 1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;
- 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- 3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

1.3 Dukungan Sumber Daya Perangkat Daerah

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Kecamatan Pancur pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang
Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	0	0	0	0	0
2	S2	2	2	0	0	4
3	S1	5	1		1	7
4	D3	0	0	0	0	0
5	SMA Sederajat	7	0	0	1	8
6	SMP Sederajat	0	1	0	0	1
7	SD	0	0	1	0	1
TOTAL		13	4	1	2	21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pancur Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang memiliki 21 pegawai, terdiri dari pegawai ASN sebanyak 18 orang meliputi 14 orang laki-laki, 4 orang perempuan, sedangkan pegawai PPPK berjumlah 3 orang meliputi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik ASN maupun PPPK, jumlah pegawai paling banyak

berpendidikan SMA sederajat sejumlah 8 orang, S1 berjumlah 7 orang, S2 sejumlah 4 Orang SMP sederajat 1 orang, dan SD sederajat 1 orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	PNS Golongan I	0	0	0
2	PNS Golongan II	2	0	2
3	PNS Golongan III	11	4	15
4	PNS Golongan IV	1	0	1
5	PPPK Golongan I	1	0	1
6	PPPK Golongan V	0	1	1
7	PPPK Golongan IX	0	1	1
TOTAL		15	6	21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pancur Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.2 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada tahun 2025 memiliki pegawai PNS dengan jumlah sebanyak 15 orang merupakan golongan III, 2 orang golongan II, sedangkan golongan IV sebanyak 1 orang, ditambah dengan pengangkatan PPPK sebanyak 3 orang yang terbagi dalam PPPK golongan 1 sebanyak 1 orang, PPPK golongan V sebanyak 1 Orang dan PPPK golongan IX sebanyak 1 orang.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Kec. Pancur Kab. Rembang
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
A	Jabatan Struktural				
1	Eselon IIIa - CAMAT	12	1	0	1
2	Eselon IIIb - SEKRETARIS CAMAT	11	1	0	1
3	Eselon IVa - KEPALA SEKSI	9	3	1	4
4	Eselon IVb - KEPALA SUBBAGIAN	9	0	2	2
B	Jabatan Fungsional Umum				
1	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	0	1
2	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	1	0	1
2	Pengadministrasi Umum	5	2	0	2

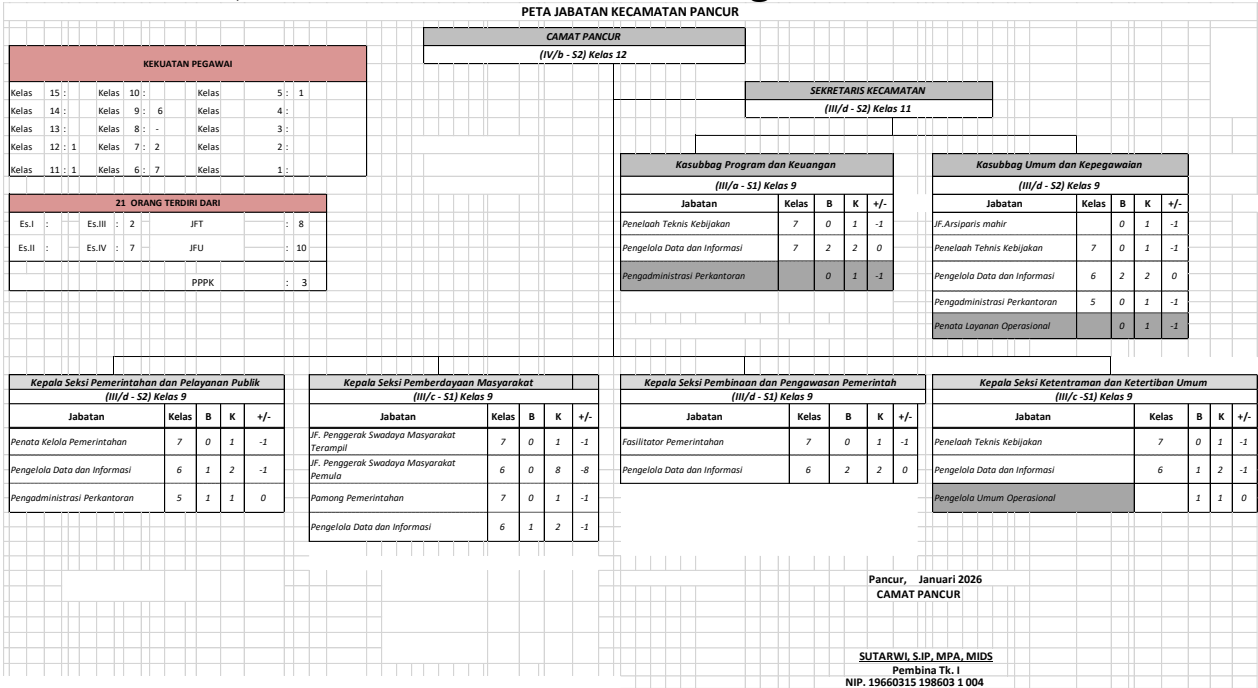
No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
3	Pengelola Kepegawaian	6	1	0	1
4	Pengelola Keuangan	6	0	1	1
5	Pengelola Gaji	6	1	0	1
5	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	2	0	2
6	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	1	0	1
7	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	0	0	0
C	PPPK				
8	Penata Kepegawaian	IX	0	1	1
9	Pengadministrasi Perkantoran	V	0	1	1
10	Pengelola Ketertiban dan Keamanan	I	1	0	1
TOTAL			15	6	21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pancur Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.3 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada tahun 2025 memiliki 8 orang dengan jabatan struktural, 10 orang dengan jabatan fungsional umum dan 3 orang PPPK yang tersebar di masing-masing seksi dan sub bagian. Berdasarkan data yang disajikan, struktur jabatan yang dimiliki Kecamatan Pancur telah mencerminkan kombinasi antara manajerial, teknis, dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan peran strategis dalam melaksanakan tusi kecamatan. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui penataan jabatan yang lebih proporsional, pengisian jabatan yang belum terisi, serta peningkatan kompetensi ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan inovatif.

Mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada tahun 2025, dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3
Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur



Berdasarkan gambar 1.3 Peta Jabatan, Persediaan, dan Kebutuhan Pegawai pada tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Pancur yang ideal sebanyak 44 orang, kondisi saat ini sudah terisi 21 orang pegawai sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 23 orang. Kondisi ini berpengaruh pada kecepatan pelayanan yang diberikan serta capaian kinerja Kecamatan Pancur.

1.3.2 Sarana Prasarana /BMD

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, namun kondisi sarana prasaran yang dimiliki Kecamatan Pancur saat ini belum cukup memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pancur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Kec. Pancur Kab. Rembang

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)
			Baik	Rusak			
				R	S	R B	
1	2		3	4		5	6
1	Aset Tetap						2.298.952.810,25
1.0	Tanah						89.187.500,00
1.0.1	Tanah	1	1				89.187.50000
2	Peralatan dan Mesin						1.068.034.278,25
2.1.1	Alat Besar						20.980.000,00
	portable generating set	2	2				20.980.000,00
2.1.2	Alat Angkutan						524.020.213,00
	station wagon	2	2				336.947.607,00
	sepeda motor	14	12			2	187.072.60600
2.1.3	Alat Pertanian	5					3.900.000,00
	penyemprot otomatis	5	5				3.900.000,00
2.1.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga						356.798.606,25,00
	lemari kayu	3	3				10.652.500,00
	filing kabinet besi	2	2				50.000,00
	lemari kaca	7	7				23.650.000,00
	Papan Nama	5	5				28.388.000,00
	mesin absensi	1	1				2.193.750,00
2.5.2. 2	Meubelair						147.139.345,00
	meja rapat	8	8				30.249.850,00
	Meja kerja kayu	1	1				3.000.000,00
	Kursi besi/metal	24	24				9.600.000,00
	Kursi kayu	8	8				16.176.000,00
	sice	1	1				5.000.000,00
	meja 1/2 biro	3	3				200.000,00
	kursi rapat	50	50				4.998.895,00
	kursi biasa	10	10				3.999.600,00
	Kursi lipat	143	143				70.565.000,00
2.5.2. 4	Alat pendingin						33.187.500,25
	AC.split	7		7			32.287.500,25
	kipas	3	3				900.000,00
2.5.2. 6	ALAT RUMAH TANGGA LAINYA(HOME USES)						62.988.200,00
	Radio	1	1				4.895.000,00
	sound system	2	2				17.150.000,00
	microhone	2	2				1.550.000,00
	Mimbar/podium	1	1				2.740.000,00
3.2.5. 3	MEJA & KURSI/ RAPAT PEJABAT						79.937.181,00
	meja kerja pejabat lain-lain	1	1				2.270.281,00
	meja rapat pejabat lainnya	10	10				15.000.000,00
	meja kerja pejabat eselon III,IV	5	5				13.500.000,00
	Meja rapat pejabat	2	2				6.580.000,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2		3	4		5	6
	kursi kerja pejabat lainnya	1	1				1.406.500,00
	Kursi kerja pejabat eselon III,IV	16	16				25.499.805,00
	kursi rapat ruangan rapat staf	50	50				21.500.000,00
	lemari buku untuk pejabat eselon III	1	1				3.000.000,00
	lemari buku arsip untuk arsip dinamis	1	1				3.499.925,00
	Buffet kaca	1	1				3.000.000,00
2.1.5	Alat Studio Audio						39.125.000,00
	audio tape reel recorder	1	1				3.300.000,00
	Peralatan Studio Video dan Film						23.740.000,00
	camera electronic	1	1				4.200.000,00
	Camera Film	1	1				1.200.000,00
	layar film/ projector	3	3				18.340.000,00
	Alat Komunikasi Telephone						800.000,00
	Handy Talky (HT)	1	1				800.000,00
2.1.6	Komputer						134.495.459,00
	pc.unit	2	2				8.974.940,00
	laptop	14	14				99.525.609,00
	Note book	1	1				4.800.000,00
	printer	7		4			21.194.910,00
3	Gedung dan Bangunan						1.151.938.427,00
	bangunan gedung	7	7				1.151.938.427,00
JUMLAH		436	427	11	0	2	3.534.298.729,25

Sumber : data BMD Kecamatan Pancur 31 Desember 2025

Dari tabel 1.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kondisi rusak meskipun tidak dalam kategori rusak berat. Sebagai gambaran AC yang berada di ruang sekretariat sudah mengalami kerusakan dan meski diperbaiki berkali-kali akan tetap bermasalah, dan AC yang berada di ruangan staf juga rusak dari jumlah AC sebanyak 7 buah, semuanya dalam keadaan rusak, kendaraan dinas roda 2 sebanyak 14 unit, 2 unit kendaraan dinas roda 2 dalam kondisi rusak berat, dalam kondisi baik sejumlah 12 unit, namun juga sudah mengalami rusak ringan tetapi masih dapat digunakan. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan paling banyak adalah komputer dan printer, dengan jumlah 7 unit, namun sebanyak 4 unit dalam keadaan rusak berat sementara unit lainnya terus melakukan service berulang, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan kantor di Kecamatan Pancur Dan yang terakhir, gedung kantor Kecamatan Pancur dengan kondisi atap yang sudah lapuk memerlukan

perbaikan ataupun pembangunan gedung kantor baru agar memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.3.3 Anggaran

Menyandingkan struktur anggaran berdasarkan belanja antara tahun 2024 dan tahun 2025 :

Berdasarkan data anggaran Kecamatan Pancur Tahun 2024 dan 2025, terdapat dinamika perubahan belanja. Pada Tahun 2024, total belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 48.057.583 dari Rp 2.152.430.000 menjadi Rp 2.200.487.553, dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 83.050.000 Meskipun ada Penurunan Pada Belanja Pegawai sebesar Rp 34.992.447.

Sementara itu, pada Tahun 2025 ada kenaikan anggaran total belanja sebesar Rp 62.172.464 dari Rp 2.206.695.900 menjadi Rp 2.268.868.364 Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 128.955.000, Belanja Mldal sebesar Rp 3.010.000, Meskipun ada Penurunan Pada Belanja Pegawai sebesar Rp 66.782.536. Pada Tahun 2024 terjadi penguatan belanja operasional untuk mendukung kinerja pelayanan, sedangkan pada Tahun 2025 Kenaikan Belanja pada Belanja Modal Peralatan dan mesin guna menunjang Kinerja pelayanan.

Data tersebut tersaji dalam tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
4.1.02	Retribusi Daerah						
	Jumlah Pendapatan						
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasional						
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 1.932.662.000	Rp 1.897.669.553	(Rp 34.992.147)	Rp 1.982.724.000	Rp 1.915.941.464	(Rp 66.782.536)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 219.768.000	Rp 302.818.000	Rp 33.050.000	Rp 223.971.900	Rp 352.926.900	Rp 128.955.000
5.1.03	Belanja Hibah						
5.2	Belanja Modal						
5.2.01	Belanja Tanah						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp. -	Rp	Rp 15.000.000	Rp 18.010.000	Rp 3.010.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
5.2.04	Belanja Modal Jalan / Irigasi/ Jaringan						
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
	Jumlah Belanja	Rp 2.152.430.000	Rp 2.200.487.553	Rp 48.057.553	Rp 2.206.695.900	Rp 2.268.868.364	Rp 62.172.464
	Total Surplus/ (Defisit)						
6	Pembiayaan daerah						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
	Jumlah Pengeluarah Pembiayaan						
	Pembiayaan Neto						

Sumber : data Keuangan Kecamatan Pancur 31 Desember 2025

1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 1.6
Tabel Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
PERENCANAAN KINERJA						
1	Melakukan koordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan di implementasikan dengan menyusun dokumen rencana aksi kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025 sesuai dengan pedoman (hasil koordinasi) yang didalamnya minimal menginformasikan tentang: Tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan/ sub kegiatan, indikator kinerja, target, realisasi, rencana waktu pelaksanaan, pejabat penanggungjawab, jadwal monitoring dan evaluasi, status rencana aksi.	a. Membuat surat kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	a. Surat usulan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	tuntas	https://drive.google.com/file/d/198_eQ_nq3Jj6F0UQfMtlCYSNmT1Gjd9z/view?usp=drive_link
2	Menyampaikan kembali dokumen renstra yang telah dilengkapi dengan nomor tanda tangan dan stempel	b. melengkapi dan menyampaikan kembali dokumen renstra yang telah dilengkapi nomor, tanda tangan, dan stempel	dokumen	Dokumen Renstra	tuntas	https://docs.google.com/document/d/1NThln4egwKaSmPhpAfvlTXJ4lbBvQ_4j/edit?usp=drive_link&oid=110211255603821059145&rt

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SAT UAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
						pof=true&sd=true
3	membuat jadwal monitoring rencana aksi	Belum membuat jadwal monitoring rencana aksi (dokumen yang dilampirkan pada link berisi surat keputusan camat pancur	dokumen	dokumen renaksi	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1uUalHvneFlvXM046iOBvuuNFmLd0YjON?usp=drive_link
4	Menyampaikan kembali pohon kinerja dan cascading dilengkapi dengan pengesahan oleh Pejabat berwenang	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bF38hekcYa3WylhcGuAyJhIRik81_s6K/edit?usp=drive_link&oid=110211255603821059145&rt=pof=true&sd=true
5	Menyajikan kembali semua dokumen perencanaan yang telah lengkap	Melengkapi dan mengupload kembali semua dokumen perencanaan yang telah formal	dokumen	Prog dan kegc pancur	Tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppFROZ8ZJqd2y8EcpKeB1GHlj1w6Guws/edit?usp=drive_link&oid=110211255603821059145&rtpof=true&sd=true

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRE S PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SAT UAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
6	Menyampaikan bukti screenshot dokumen perencanaan yang telah di upload perangkat daerah	Mempublikasikan dokumen perencanaan pada website kecamatan pancur dan mengirim bukti screenshot hasil upload	dok ume n	Screensot Sapa kinerja 2024	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Lz3JOep8qdlV6Nv9GpbYwvy5VD65ozo/view?usp=drive_link
7	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu urusan pemerintahan (perencanaan/diklat) penyelenggaraan bintek penyusunan penjenjangan kinerja/pohon kinerja	Membuat surat kepada unit organisasi pengampu urusan pemerintahan (perencanaan/diklat) penyelenggaraan bintek penyusunan penjenjangan kinerja/pohon kinerja	dok ume n		tuntas	
8	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja nsesuai peraturan mentri PAN-RB nomor 89 tahun 2021	Belum memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja nsesuai peraturan mentri PAN-RB nomor 89 tahun 2021	dok ume n	Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1j5ItxvUsjJMCcP4CaNFO8Gfuz3PJjBl0/view?usp=drive_link
8	Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK/pejabat strukturan maupun fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Membuat laporan realisasi pencapaian target indikator pengukuran kinerja pada sasaran strategis kecamatan pancur	dok ume n	notulen rapat penyusunan renja,PK,RKT Renaksi	tuntas	https://docs.google.com/document/d/1_07sE2bb7Gp2w-IZuH4nWhJlK1QZCP8D/edit?usp=dr

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRE S PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SAT UAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
						ive link&ou id=1102112 556038210 59145&rtp of=true&sd =true
PENGUKURAN KINERJA						
1	Menyusun laporan hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan Renja triwulan 1 dan 2 tahun 2024	Menyusun laporan hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan Renja triwulan 1 dan 2 tahun 2024	dok ume n	Evaluasi renja 2024	tuntas	https://driv e.google.co m/drive/fo lders/1Db7X xmKaB- GUZiTQQx MKbAoduX dxqQX3?us p=drive_lin k
	Membuat laporan pemantauan berjenjang atas capaian kinerja unit dibawahnya triwulan/semesteran	Membuat laporan pemantauan berjenjang atas capaian kinerja unit dibawahnya triwulan/semesteran	dok ume n	Casceding dan pohon kinerja tahun 2024	tuntas	https://driv e.google.co m/file/d/1e CbV6WZ7_ hyZOWngs9 A_qQ86PiN a9- 42/view?us p=drive_lin k
2	Melampirkan screenshot bukti input data ekinerja pada emonev	Melampirkan screenshot bukti input data ekinerja pada emonev	dok ume n	screenshot sapa kinerja 2024	tuntas	https://driv e.google.co m/file/d/1L = z3JOep8qdL V6Nv9GpbY wvy5VD65o zo/view?us p=drive_lin k

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SAT UAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
3	Masing-masing unit kerja (sekretariat sub bagian dan seksi) agar menyusun laporan kinerja secara berkala (triwulan I sampai IV) dengan mempedomani rencana aksi tahun 2024 yang telah ditetapkan	Masing-masing unit kerja (sekretariat sub bagian dan seksi) agar menyusun laporan kinerja secara berkala (triwulan I sampai IV) dengan mempedomani rencana aksi tahun 2024 yang telah ditetapkan	dokumen	SKP tahun 2024	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1dzcdS2WH8pRGskLbtCjllqbqLIq3RUXA?usp=drive_link
PELAPORAN KINERJA						
1	Menyampaikan kembali dokumen LKJIP tahun 2021-2023 secara lengkap	Mengupload kembali dokumen LKJIP tahun 2021-2023 secara lengkap	dokumen	lkjip tahun 2021-2023	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1oOI1NsBWRn6qA0iRP9rt7hKckv-G9adl/view?usp=drive_link
2	Memperbaiki rencana kinerja/LKJIP tahun 2023 dengan menindaklanjuti rekomendasi yang belum tuntas	Memperbaiki rencana kinerja/LKJIP tahun 2023 dengan menindaklanjuti rekomendasi yang belum tuntas	dokumen	SOP penyusunan LKJIP	tuntas	https://docs.google.com/document/d/1yvgrs8YvVXIKCX7q-aL06gXoFg01JC40/edit?usp=drive_link&ouid=110211255603821059145&rtpof=true&sd=true
3	Melampirkan bukti screenshot LKJIP yang telah diupload ke website perangkat daerah	Melampirkan bukti screenshot LKJIP yang telah diupload ke website perangkat daerah	dokumen	screensot Sapa kinerja 2024	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Lz3JOep8qdLV6Nv9GpbYwvy5VD65o

N O	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUTPUT		STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SAT UAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
						zo/view?usp=drive_link
4	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya	dokumen	rencana kinerja tahun 2024	tuntas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2Eywqlwe2RAMkxwabza0c6X6VU07omB/edit?usp=drive_link&ouid=110211255603821059145&rtpof=true&sd=true
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
1	Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP	Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP	dokumen	Rencana aksi tahun 2024	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1CzGGCMYE46XcfS9t-PaevzxVdhVYOMs9/view?usp=drive_link

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rembang
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.8.6.3/5792/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja tahun 2021-2026, Kecamatan Pancur mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kecamatan Pancur selama lima tahun adalah: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Kragan dalam waktu lima tahun dijabarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kec. Pancur Kab. Rembang

Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2021)	Target Tahun					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Indeks	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	84	85	86	87	88	88,5	88,5

Sumber : Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kec. Pancur Kab. Rembang

Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	84	85	86	87	88	88,5

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancur Tahun 2025

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Kecamatan Pancur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Pancur tahun 2021 – 2026 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan Kegiatan Kecamatan Pancur sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik			2.221.695.900	2.286.878.364	65.182.464
2		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		2.221.696.900	2.286.878.364	65.182.464
3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.121.215.400	2.053.076.864	- 68.138.536
			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	722.000	0	- 722.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	361.000	0	- 361.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.000	0	- 361.000
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.045.484.000	1.957.781.484	- 87.702.536
5			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.982.724.000	1.915.941.464	- 66.782.536
6			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.760.000	41.840.000	- 20.920.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.484.000	300.000	- 1.184.000
				1.484.000	300.000	- 1.184.000
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.650.400	12.885.400	2.235.000
8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	1.650.000	0
10			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.111.200	2.071.200	- 40.000
11			Penyediaan Bahan/Material	6.889.200	9.164.200	2.275.000
13			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	18.010.000	3.010.000

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
14			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-	3.010.000
15			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.875.000	59.100.000	18.225.000
16			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	19.500.000	- 4.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.875.000	39.600.000	22.725.000
18			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	5.000.000	- 2.000.000
19			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000	5.000.000	- 2.000.000
22			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.041.000	120.000.000	115.959.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	120.000.000	120.000.000
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Terkait	0	120.000.000	120.000.000
23			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.166.000	0	- 2.166.000
24			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.166.000	0	- 2.166.000
25			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1.875.000	0	- 1.875.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.875.000	0	- 1.875.000
26			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.008.900	75.395.900	11.387.000
27			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.008.900	75.395.900	11.387.000

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
28			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.015.800	18.240.800	- 2.775.000
29			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.993.100	57.155.100	14.162.000
30			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.160.000	26.535.000	2.375.000
31			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.160.000	26.535.000	2.375.000
32			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.160.000	26.535.000	2.375.000
33			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.600.000	3.200.600	800.000
34			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.600.000	3.200.600	600.000
35			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.600.000	3.200.000	600.000
36			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.670.000	8.670.000	3.000.000
37			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.670.000	8.670.000	3.000.000
38			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.670.000	8.670.000	3.000.000
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025				2.206.695.900	2.286.878.364	65.182.464

Sumber : DPA Kecamatan Pancur Tahun 2025

2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan tertulis yang berisikan penugasan dari pemberi amanah (atasan langsung) dengan penerima amanah (bawahan langsung) yang memuat target kinerja terukur, indikator keberhasilan dan komitmen penggunaan sumber daya dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun Perjanjian Kinerja Camat Pancur Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Indeks	3,4
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	96,78

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.121.215.400
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.041.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64.008.900
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.160.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.600.600
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.670.000
	Jumlah	2.221.695.900

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Pancur Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Pancur Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Indeks	3,4
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat / IKM	Indeks	96,78

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.286.878.364
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	120.000.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75.395.900
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.535.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.200.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.670.000
	Jumlah	2.286.878.364

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Beberapa Instrumen yang mendukung pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pancur adalah :

1. Media Sosial Kecamatan Pancur :
Berisi Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun di Kecamatan Pancur, antara lain :
 - a. Instagram :



Kecpancur_rembang
@kecpancur_rembang

27
Mengikuti

72
Pengikut

73
Suka

📍 kantor kecamatan pancur
Jl. Jatirogo No. 20, Kecamatan Pancur, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah

Ikuti

Pesan



b. Tiktok :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pancur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pancur.

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Pancur Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026) (klm. 6:klm.9) x 100%
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<u>indikator :</u> <u>Indeks Pelayanan Publik / IPP</u> <u>meta indikator :</u> <u>Nilai Indeks Pelayanan Publik</u> <u>= 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan)</u> <u>+ 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)</u>	indeks	3,4	3,20	94,11	Tinggi	3,5	91,42
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	<u>indikator :</u> <u>Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM</u> <u>meta indikator :</u> <u>IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang</u>	indeks	88	96,78	109,97	Sangat Tinggi	89	108,74

Sumber : Laporan capaian kinerja PD Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang TW I-IV Taxhun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Untuk indeks pelayanan publik capaian sebesar 94,11% dan jika dibandingkan dengan target renstra mencapai 91,42%. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Pancur mencapai 96,78% dari target yang telah ditentukan, bahkan melampau 100% persen saat dibandingkan dengan target renstra. Untuk mempertahankan capaian Tujuan/Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Pancur kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Kecamatan Pancur : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	indikator : Indeks Pelayanan Publik / IPP meta indikator : Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal)	indeks	3,4	3,20	94,11	3,5	91,42

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik meskipun nilai Indeks Pelayanan Publik tidak mencapai target dikarenakan perubahan ke arah digitalisasi yang tidak diimbangi dengan kompetensi SDM yang menangani pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Pancur kami akan mengupayakan :

- 1. Berinovasi dibidang pelayanan;
- 2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
- 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
- 4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.2 Sasaran Perangkat Derah

Kinerja Sasaran Kecamatan Pancur : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	<u>indikator :</u> Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM <u>meta indikator :</u> IKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur)/(Total unsur yg terisi) x Nilai Penimbang	indeks	88	96,78	109,97	89	108,74

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang efektif dan akuntabel, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 96,78 dengan capaian 109,97% yang mencerminkan kualitas pelayanan sangat baik. Untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Pelayanan PATEN yang semakin memadai untuk masyarakat, dengan tersedianya blanko KTP di PATEN Kecamatan, masyarakat tidak perlu ke Kantor Dindikcapil Rembang untuk mencetak KTP.
2. Dengan mayoritas mengacu sistem 5 hari kerja, pengadaan piket pelayanan di hari Sabtu sangat membantu warga pekerja mengurus berkas administrasi yang tidak bisa hadir saat jam kerja.
3. ASN Kecamatan Pancur baik sangat informatif kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan surat-surat administratif, perijinan, proposal bantuan maupun pemberian informasi kegiatan.

Keberhasilan capaian Sasaran Perangkat Daerah, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Pancur	Angka	84	67,45	96
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	91	0	0
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	91	91
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	18	90
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	8	66,66
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	100
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	0	0	0
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	Paket	100	99,30	99,3
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	11	91,66
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	11	91,66
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	%	0	0	0
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	100	100	100
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8	66,66
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	%	85	85	100
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	19	100
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	100	65,16	65,16
30	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	65,16	65,16
31		Persentase Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	Dokumen	100	90	90
32	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%	12	65,16	5,43
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0
34	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	0	0
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	5	0	0
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	%	100	97,76	97,76
37		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Unit	16	16	100
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	Laporan	100	97,76	97,76
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	7	7	100
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	27	97,11	97,11
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	100	95	95
42	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	95,25	95,25
43	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	27	95,25	95,25

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang	100	96	96
45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	96,87	96,87
46	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Angka	100	96	96
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	%	100	99,88	99,88
48	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Dokumen	70	69	98,57
49	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	27	26	96,29
50	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	0	0	0
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	0	0	0

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencerminkan kualitas pelayanan sangat baik, didukung oleh partisipasi masyarakat desa yang tinggi (168,75%). Stabilitas wilayah, pembinaan desa, dan pelayanan administrasi juga tercapai 100%. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, seperti nilai SAKIP (96,36%), kepatuhan pelunasan PBB desa (90,05%), serta tertib administrasi penatausahaan keuangan (66,67%) dan belum terlaksananya pengadaan sarana prasarana aparatur (0%). Perbaikan pada aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun berikutnya.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,00	84,14	100,16	85,00	85,03	100,03	86,00	84,86	98,67	87,00	89,72	103,12	88,00	96,78	109,97

Sumber : Kecamatan Pancur

Pada sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan*”, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi kinerja sebesar 96,78 dengan tingkat capaian mencapai 109,97% sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 hingga 2024, kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dan menunjukkan konsistensi perbaikan kualitas pelayanan. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik serta peningkatan koordinasi dan efektivitas kerja perangkat kecamatan. Dengan demikian, sasaran strategis ini dapat dikategorikan berhasil (sangat baik), meskipun tetap diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan untuk menjaga kualitas capaian pada tahun berikutnya.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pancur Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realiasasi Kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

No	Indikator	Realisasi Kec. Pancur th. 2025	Realisasi Provinsi Jateng th. 2025	Realisasi Kab. Rembang th. 2025	Realisasi KecamatanSekitar		
					Lasem	Pamotan	Sluke
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	96,78	88,5	90,55	96,78	89,89	91,34
2	Nilai SAKIP OPD	62,61	82,85	65,97	68,95	66,56	71,11

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi kinerja Kecamatan Pancur tahun 2025 mencapai 96,78, lebih tinggi dibandingkan realisasi Kabupaten Rembang sebesar 90,55 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,5. Jika dibandingkan dengan kecamatan sekitar, capaian Kecamatan Pancur sama dengan Kecamatan lasem mencapai 96,78, namun lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Pamotan sebesar 89,89 dan Kecamatan Sluke sebesar 91,34. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pancur tergolong baik dan kompetitif, meskipun masih terdapat peluang peningkatan agar dapat melampaui capaian kecamatan dengan kinerja tertinggi.

Pada indikator Nilai SAKIP OPD, realisasi kinerja Kecamatan Pancur tahun 2025 sebesar 62,61, lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Rembang sebesar 65,97, dan masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 82,85. Jika dibandingkan dengan kecamatan sekitar, capaian Kecamatan Pancur sangat rendah dibandingkan Kecamatan Pamotan sebesar 66,56 dan Kecamatan Lasem sebesar 68,95, dan Kecamatan Sluke yang mencapai 71,11. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kecamatan Pancur berada pada kategori cukup baik, dan masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelarasan perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan agar dapat mendekati capaian tingkat provinsi maupun kecamatan dengan kinerja lebih tinggi.

Secara umum, berdasarkan kedua indikator tersebut, kinerja Kecamatan Pancur tahun 2025 menunjukkan hasil cukup baik dan kompetitif di tingkat

kabupaten, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek akuntabilitas kinerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Kecamatan Pancur Kab. Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kontribusi Tujuan dan sasaran Kec.Pancur Kab.Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	78	65,97				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,4	3,20	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3,92	3,2
3					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	98	96,78

Pada sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan” dengan indikator Nilai SAKIP, ditetapkan target sebesar 78 dengan realisasi sebesar 65,97. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, kontribusi Kecamatan Pancur sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP di tingkat kecamatan, meskipun hasil yang dicapai masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Pada sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, ditetapkan target sebesar 3,4 dengan realisasi sebesar 3,20. Kecamatan Pancur berkontribusi melalui tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang memiliki target sebesar 3,92 dan realisasi sebesar 3,2. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kecamatan Pancur sudah berjalan namun belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ditetapkan target sebesar 98 dengan realisasi sebesar 96,78. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Pancur berada pada kategori baik, namun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di tingkat Pemerintah Daerah.

Secara umum, tujuan dan sasaran Kecamatan Pancur telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada beberapa indikator agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Pancur Kab. Rembang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasarn	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	88	96,78	109,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.053.076.864	1.859.357.980	90,56
2						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	120.000.000	78.198.400	65,17
3						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	75.395.900	73.708.300	97,76
4						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	26.535.000	25.275.000	95,25
5						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.200.000	3.100.600	96,89
6						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.670.000	8.660.000	100,00

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), ditetapkan target kinerja sebesar 88 dengan realisasi sebesar 96,78, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 109,97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kepada masyarakat berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh beberapa program dengan realisasi anggaran yang bervariasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.053.076.864 dengan realisasi sebesar Rp1.859.357.980 atau capaian 90,56%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki pagu sebesar Rp120.000.000 dengan realisasi sebesar Rp78.198.400 atau capaian 65,17%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pagu anggaran sebesar Rp75.395.900 dengan realisasi sebesar Rp73.708.300 atau capaian 97,76%, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi. pada Program Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum, pagu anggaran sebesar Rp26.535.000 dengan realisasi sebesar Rp25.275.000 demikian pula pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pagu anggaran sebesar Rp3.200.000 dengan realisasi sebesar Rp3.100.600 demikian pula program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pagu anggaran memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 100%, yang mengindikasikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara maksimal sesuai perencanaan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada seluruh program menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan efektif, serta mendukung pencapaian kinerja sasaran secara optimal. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

3.6 Analisa Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Kragan berdasar anggaran yang ada dalam DPA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				2,286,877,764	2,048,300,280			238,577,484
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	95	95	2,053,076,864	1,859,357,980	90.56	9,43	193,718,884
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	95	95	1,957,781,464	1,781,928,432	91.02	8,98	175,853,032

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	100	1,915,941,464	1,748,048,432	91.24	8,76	167,893,032
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	8	66,66	41,840,000	33,880,000	80.98	19,02	7,960,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	300,000	300,000	100.00	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	100	83,33	300,000	300,000	100.00	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	12,885,400	12,795,600	99.30	0,69	89,800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	1,650,000	1,650,000	100	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	100	2,071,200	1,981,400	95.66	4.34	89,800
	Penyediaan Bahan/Material	1	1	100	9,164,200	9,164,200	100	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	75	100	18,010,000	17,150,000	95.22	4.78	860,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3	100	18,010,000	17,150,000	95.22	4.78	860,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95	95	59,100,000	42,693,948	135	27.76	16,406,052
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	19,500,000	10,533,022	54	45.98	8,966,978
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	7	58,33	39,600,000	32,160,926	81	18.79	7,439,074
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	93	100	5,000,000	4,490,000	90	10.20	510,000

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	16	100	5,000,000	4,490,000	90	10.20	510,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98	65	66,33	120,000,000	78,198,400	65.17	34.83	41,801,600
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	65	65	120,000,000	78,198,400	65	34.83	41,801,600
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	100	120,000,000	78,198,400	65	34.83	41,801,600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100	75,395,900	73,708,300	97.76	2.24	1,687,600
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	75,395,900	73,708,300	97.76	2.24	1,687,600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23	23	100	18,240,800	18,203,300	100	0.21	37,500
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	100	57,155,100	55,505,000	97	2.89	1,650,100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100	26,535,000	25,275,000	95.25	4.75	1,260,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	26,535,000	25,275,000	95	4.75	1,260,000
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	26,535,000	25,275,000	95	4.75	1,260,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100	3,200,000	3,100,600	96.89	3.11	99,400
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	3,200,000	3,100,600	97	3.11	99,400

NO	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	150	100	3,200,000	3,100,600	97	3.11	99,400
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90	90	100	8,670,000	8,660,000	100	0.12	10,000
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80,32	80	99,60	8,670,000	8,660,000	100	0.12	10,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	100	8,670,000	8,660,000	100	0.12	10,000

Sumber : Kecamatan Pancur

Secara umum, efisiensi anggaran Kecamatan Pancur Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup efektif dan efisien, ditandai dengan capaian kinerja yang tinggi disertai tingkat serapan anggaran yang optimal. Pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, capaian kinerja sebesar 65,00% dengan realisasi anggaran sebesar 65,17%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien dan belum mencapai target kinerja secara maksimal.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,76%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2,24% atau senilai Rp1.687.600. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran tersebut berhasil dicapai secara maksimal.

Pada tingkat program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 95% dengan realisasi anggaran 90,56%, menghasilkan efisiensi sebesar 3,88% atau Rp193.718.884. Efisiensi juga terlihat pada kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dan efisiensi 8,76% 167.893.032. Selain itu, efisiensi signifikan terdapat pada komponen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat efisiensi 27,76% atau sebesar Rp16.406.052. serta Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 45,98% atau Rp8.966.878.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian kinerja mencapai 65% dengan realisasi anggaran 65,17%, menghasilkan efisiensi sebesar 34,83% atau Rp41.801.600, yang menunjukkan pelaksanaan program belum efektif. Demikian pula pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, capaian kinerja 100% dengan efisiensi 2,24% (Rp1.687.600), menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat optimal. Sementara itu, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing sebesar 100%, yang mengindikasikan tidak terdapat efisiensi namun pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dengan beberapa komponen menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup signifikan tanpa mengurangi capaian kinerja. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, meskipun tetap diperlukan optimalisasi pada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum maksimal agar efisiensi yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif efektif, terutama pada program-program yang memiliki capaian kinerja 100% dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Program yang paling menunjang keberhasilan antara lain Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program-program tersebut menunjukkan capaian kinerja maksimal dan realisasi anggaran yang sangat baik (mendekati atau mencapai 100%), sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pada level kegiatan, beberapa kegiatan yang sangat mendukung keberhasilan kinerja antara lain Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, serta kegiatan pada bidang pemberdayaan

masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum yang seluruhnya mencapai target kinerja 100%. Keberhasilan ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang efektif.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini terutama terlihat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meskipun memiliki capaian cukup baik (100%), namun belum mencapai target secara penuh. Pada kegiatan tertentu seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (capaian kinerja 100%) serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD (capaian 66,66%), menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan, baik dari sisi perencanaan kebutuhan maupun pelaksanaan teknis kegiatan.

Selain itu, kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga menunjukkan capaian kinerja yang relatif rendah (58,33%) dengan tingkat serapan anggaran yang belum optimal (81,00%). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya dukungan terhadap kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025 didominasi oleh program-program operasional yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, beberapa kendala masih ditemukan pada program penunjang administratif, khususnya pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi berkelanjutan agar seluruh program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

3.7 Inventarisasi Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Kragan, untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan optimalisasi lintas sektoral. Optimalisasi lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektoral Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	BPPKAD	Kebijakan penganggaran	Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah, Kabupaten	a. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD
		Bappeda	Penyelarasan RKP dengan RKPD, Kebijakan penganggaran			a. Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government)
		DPRD	Pokok pikiran DPRD			b. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
2.	Penyusunan Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen/ Laporan Evaluasi Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	c. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Kecamatan
		Inspektorat	Mengarahkan penyusunan LKjPD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			d. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Bagian Organisasi Setda	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP			
3.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Bappeda	Mengakomodir usulan masyarakat	Berita Acara Musren, Daftar usulan masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk melaksanakan arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
		DPRD	Mengakomodir usulan masyarakat dan pemberi pikir			
		OPD Kabupaten	Mengawal usulan masyarakat			
		Masyarakat	Menyampaikan usulan pembangunan desa			
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Koordinasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan Keuangan	Perangkat Daerah	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKD	Mengakomodir semua kegiatan kepegawaian	Laporan Kepegawaian	Perangkat Daerah	
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa	Optimalisasi pembayaran PBB	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Capaian pembayaran PBB digunakan sebagai syarat fasilitasi Pencairan DBHPRD
		Dindukcapil	Penyediaan server dan blanko untuk pelayanan publik			Masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dari Kecamatan
7.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Desa	Rencana kerja dan pendanaan dari APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa	Linmas untuk Keamanan Desa	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		SATPOL PP	Koordinasi untuk kegiatan daerah			
		TNI/POLRI	Keamanan wilayah kecamatan dalam skala besar			
9.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	Rencana Kerja dan Penggunaan Dana APBDes	Laporan Kegiatan	Perangkat Daerah, Desa, Masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di OPD
		OPD Kabupaten	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan			

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pancur Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Kragan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Pancur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pancur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target yang ditetapkan

Hasil laporan kinerja Kecamatan Pancur Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Kecamatan Pancur adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan nilai IPP sebesar 3,4 dan capaian 94,11%.
2. Kecamatan Pancur memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang dicapai dengan hasil sangat baik dengan nilai IKM sebesar 96,96 dan capaian target 109,97%.

4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah

Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kecamatan Pancur sebagai berikut :

- a. Disiplin dan Etos kerja ASN di Kecamatan yang mampu melaksanakan kegiatan dengan jumlah anggaran yang terbatas.
- b. Koordinasi lintas sektoral yang terjalin dengan baik antara Kecamatan dengan OPD lain di wilayah kecamatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Pancur adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran kegiatan.

2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pancur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pancur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kinerja kami di tahun anggaran berikutnya.

Rembang, 18 Februari 2026



SUTARNO, S.IP.MPA.MIDS

Pembina Tk. I

NIP. 19680930 199303 1 007

LAMPIRAN

1. SK IKU TAHUN 2021-2026
2. PK CAMAT KRAGAN TAHUN 2025
3. PK CAMAT KRAGAN PERUBAHAN TAHUN 2025
4. PK CAMAT KRAGAN PERUBAHAN PERGANTIAN PA TAHUN 2025
5. SK SOP PENYUSUNAN LKJIP DAN SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
6. PROFIL INDIKATOR
7. POHON KINERJA
8. CASCADING
9. PIAGAM PENGHARGAAN